



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 April 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PRAMONO ANUNG WIBOWO**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **12349**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 35.427.059.686**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/240 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.073.988.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2260 m2/1200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 24.201.933.686
3. Tanah dan Bangunan Seluas 544 m2/80 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 259.304.000
4. Tanah Seluas 1335 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
5. Tanah Seluas 21400 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
6. Tanah Seluas 14300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
7. Tanah Seluas 730 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 527.939.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 2285 m2/390 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.893.895.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 4.244.377.900**



1. MOBIL, MINI COOPER SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. MOBIL, MERCEDES BENZ EQS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 3.084.377.900

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.135.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	37.250.208.528
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.078.728.915
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	115.135.375.029
III. HUTANG	Rp.	616.875.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	114.518.499.429

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.